

EVALUASI MANAJEMEN BENCANA BANJIR (PRA BENCANA) PADA PUSKESMAS PENDERE, SULAWESI TENGAH

Stefiani Bengan Laba¹, Muhammad Jusman Rau², Muhammad Aji Satria³, Nur Hikmah Buchair⁴, Sulistiana Syahrir⁵, Muh. Fadil Nursyawal⁶

Departemen Epidemiologi FKM Untad^{1,2,4,5,6}, Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja FKM Untad²

*Corresponding Author : stefiani.bengan.l@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam salah satunya adalah banjir. Banjir dapat terjadi kapan saja dan sejak 1815-2019 menjadi bencana yang sangat sering terjadi dengan jumlah 3885 bencana banjir. Sebagai negara yang rawan terhadap bencana, pemerintah dan masyarakat dituntut untuk dapat beradaptasi dengan bencana, salah satunya melalui manajemen bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pra bencana di Puskesmas Pandere, Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif dengan menggunakan metode studi evaluasi. Responden penelitian dalam penelitian ini adalah petugas surveilans di Puskesmas Pandere. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dan studi dokumen. Puskesmas yang berada di Wilayah Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi yang terdampak banjir pada Bulan September Tahun 2022. Dalam hal manajemen pra bencana banjir, Puskesmas Pandere telah memiliki jalur evakuasi, inventaris sumber daya sesuai potensi bahaya yang mungkin terjadi, sudah dapat menerima dan menindaklanjuti informasi peringatan dini, tim kesehatan dalam Satgas dan telah melaksanakan koordinasi lintas sektor. Akan tetapi, Puskesmas Pandere belum memiliki Peta Geomedik Daerah Rawan Bencana yang ada hanyalah peta terdampak. Puskesmas Pandere dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dalam manajemen pra bencana banjir mengingat wilayah kerja Puskesmas Pandere yang berpotensi untuk terus terjadi bencana banjir ketika musim hujan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan peta geomedik yang berisikan informasi terkait potensi bencana tidak hanya dalam aspek kesehatan saja tetapi juga dalam hal sosial dan ekonomi.

Kata kunci : manajemen bencana, peran puskesmas dalam manajemen bencana, pra bencana

ABSTRACT

Indonesia is a country prone to natural disasters, one of which is flooding. Flooding can occur at any time, and from 1815 to 2019, it has been a very frequent disaster, with a total of 3885 flood disasters recorded. As a disaster-prone country, the government and the community are required to adapt to disasters, one of which is through disaster management. This research aims to evaluate pre-disaster activities at Puskesmas Pendere, Central Sulawesi. This research was conducted using a descriptive method with an evaluation study approach. The research respondents in this study were surveillance officers at Puskesmas Pendere. Data collection was carried out through interviews and document studies. Puskesmas Pendere, located in the Gumbasa Subdistrict of Sigi Regency, was affected by flooding in September 2022. In terms of pre-disaster flood management, Puskesmas Pendere has established evacuation routes, inventoried resources according to potential hazards that may occur, can receive and respond to early warning information, has a health team within the task force, and has conducted cross-sector coordination. However, Puskesmas Pendere does not yet possess a Geomedical Map of Disaster-Prone Areas; only maps of affected areas are available. Puskesmas Pendere should continue to maintain and improve its readiness in flood pre-disaster management, given the potential for ongoing flood disasters during the rainy season in its working area. This can be achieved by providing a geomedical map that contains information about disaster potential not only in health aspects but also in social and economic aspects.

Keywords : disaster mnagement, pre-disaster, the role of public health services in disaster management

PENDAHULUAN

Banjir merupakan bencana alam yang bisa saja terjadi setiap saat dan seringkali menyebabkan hilangnya nyawa juga harta benda (Findayani, 2015). Banjir adalah bencana yang paling sering terjadi di Indonesia yakni sebanyak 3885 sejak tahun 1815-2019 (Fitriyani et al., 2021). Hal serupa juga dinyatakan oleh (Azizah et al., 2021) yang menyatakan bahwa bencana banjir merupakan bencana yang paling berisiko di wilayah Indonesia. Banjir merupakan salah satu jenis bencana hidrologi yang disebabkan oleh kelebihan peredaran air (Adiyoso, 2018). Menurut Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (2007) terdapat dua pengertian dari banjir yakni aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai dan menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai dan pengertian selanjutnya adalah gelombang banjir berjalan ke hilir sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air di muara akibat badai. Selain itu, menurut Husein and Onasis (2015) banjir merupakan bencana akibat curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi oleh saluran pembuangan air yang memadai sehingga merendam wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang ada di sana. Banjir juga bisa terjadi karena jebolnya sistem aliran air yang ada sehingga daerah yang rendah terkena dampak kiriman banjir.

Berdasarkan jenisnya banjir dibedakan menjadi 5 oleh Anies (2017) yakni banjir air, banjir dadakan, banjir bandang, banjir pasang dan banjir lahar dingin. Sedangkan menurut Husein and Onasis (2015) banjir dibedakan menjadi tiga yakni banjir sungai, banjir danau dan banjir pasang laut. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya banjir antara lain penebangan hutan secara liar tanpa adanya reboisasi, pendangkalan sungai, pembuangan sampah sembarangan ke aliran sungai, pembuatan saluran air yang tidak memenuhi syarat, pembuatan tanggul yang kurang baik, curah hujan, kejadian bencana lain seperti gempa bumi dan badai (Anies, 2017 dan Husein and Onasis, 2015). Banjir sering terjadi di wilayah yang banyak dialiri oleh aliran sungai (Anies, 2017).

Curah hujan yang tinggi yakni antara 2000-3000 mm/tahun dan keberadaan 600 sungai di Indonesia menyebabkan banyaknya kejadian banjir di musim hujan (Findayani, 2015). Selain itu, menurut Qodriyatun (2020) banjir merupakan bencana yang terjadi akibat berkurangnya atau tidak ada lagi ruang resapan air hujan sehingga sungai tidak mampu menampung air limpasan hujan sehingga air limpasan hujan tersebut kemudian menggenangi wilayah pemukiman, jalan dan tempat lainnya yang seharusnya tidak dialiri. Jika ditinjau dari keterpaparan akibat bencana, banjir memiliki keterpaparan paling tinggi dengan jumlah 32.034.250 atau sebanyak 56% (Fitriyani et al., 2021). Manajemen bencana merupakan seperangkat rencana, prosedur, sumber daya, personal dan berbagai hubungan, yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh bahaya, keadaan darurat dan bencana yang dihadapi oleh masyarakat Abrahams (2001) dalam Anies (2017). Sedangkan menurut BNPB (2008) metode penanggulangan bencana terdiri dari serangkaian upaya terkait penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. menurut Anies (2017); BNPB (2007) ; BNPB (2008) tahapan manajemen bencana terdiri dari Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana.

Indonesia dikenal sebagai daerah rawan bencana dan berdasarkan penilaian risiko bencana banjir menempati urutan pertama dengan nilai risiko sebesar 15,4 diikuti oleh tanah longsor dan puting beliung. Berdasarkan hasil perhitungan nilai risiko bencana terhadap 32 provinsi di Indonesia diketahui bahwa Sulawesi Tengah menempati urutan ke empat setelah beberapa provinsi di Pulau Jawa yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan nilai risiko sebesar 10,35 (Azizah et al., 2021). Penelitian dari (Martini, 2011) juga menyatakan bahwa Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang memiliki risiko besar untuk terjadi bencana banjir dan tanah longsor karena kondisi topografis wilayah Sulawesi Tengah yang bertebing dan juga

kondisi geologi dengan endapan tanah pasir, batu dan kerikil yang mudah berpindah oleh air. Kabupaten Sigi merupakan bagian wilayah administratif dari Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2008. Ibu Kota Kabupaten Sigi adalah Bora yang lokasinya berada di Kecamatan Sigi Biromaru. Terdapat banyak wilayah rawan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sigi yakni Kecamatan Lindu, Pipikoro, Kulawi Selatan, Kulawi Raya, Dolo, Marowola dan Gumbasa. Wilayah tersebut rawan bencana karena banyaknya sungai dan kondisi tanah labil sehingga mudah terjadi banjir dan longsor saat curah hujan meningkat (Bagenda et al., 2020).

Pada tanggal 6 September 2022 telah terjadi banjir di dua kecamatan di Kabupaten Sigi yaitu Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Gumbasa. Akibat dari bencana banjir tersebut, Jembatan Gumbasa putus dan mengakibatkan tergenangnya pemukiman warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian banjir ini akan tetapi 45 kk/ 180 orang terdampak bencana (PKK Kemenkes, 2022). Selain itu, menurut data BNPB (2022) terdapat 182 KK yang terdapat bencana dan 662 jiwa yang mengungsi. Bencana banjir tersebut juga mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana dimana 2 unit rumah rusak berat, 5 unit rumah rusak sedang dan 157 rumah rusak ringan. Selain itu, bencana banjir tersebut mengakibatkan rusaknya 1 rumah ibadah dan 1 balai desa.

Dalam konsep bencana yang terjadi secara tiba-tiba, usaha penanggulangan bencana biasanya lebih terfokus pada kejadian pasca bencana (Qurrotaini & Diana, 2021). Sebagai daerah yang rentan untuk terdampak bencana banjir, Kabupaten Sigi harus memiliki sistem manajemen bencana yang berkembang. Konsep menunggu bencana saja tidak bisa dilaksanakan. Pemerintah dan masyarakat harus mampu untuk menerapkan konsep manajemen bencana. Konsep manajemen bencana terdiri dari kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007). Dalam aspek epidemiologi, terdapat konsep manajemen bencana epidemiologi. Hal tersebut menekankan pada kegiatan kesehatan masyarakat khususnya puskesmas dalam menyikapi bencana dan dalam penelitian ini adalah bencana banjir (Degutis, 2014). Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi kegiatan pra bencana di Puskesmas Pandere.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif dengan menggunakan metode studi evaluasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan pra bencana di Puskesmas Pandere. Responden penelitian dalam penelitian ini adalah petugas surveilans di Puskesmas Pandere. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dan studi dokumen dan akan dilaksanakan di Puskesmas Pandere, Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi. Lokasi penelitian ini diambil karena daerah tersebut sering terdampak banjir, dan terakhir kali kejadian banjir terjadi pada tanggal 6 September 2022. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Mei 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Tim Gerak Cepat Puskesmas Pandere. Sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Analisa data yang digunakan adalah analisis data deskriptif menggunakan kuesioner dari (Mimanggar, 2014). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari Puskesmas Pandere berupa data kegiatan pra bencana dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian. Data Primer berasal dari wawancara menggunakan kuesioner terbuka dan studi dokumentasi sebagai. Data yang diperoleh akan dijabarkan berdasarkan kriteria sistem pra bencana.

HASIL

Puskesmas Pandere berada dalam wilayah Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi yang memiliki luas wilayah 176,9 Km² dengan 7 Desa di dalamnya. Kecamatan Gumbasa sendiri

merupakan salah satu Kecamatan yang terdampak bencana banjir Bulan September Tahun 2022. Puskesmas Pandere sendiri berbatasan dengan Kecamatan Tanambulava di Sebelah Utara dan Berbatasan dengan Kecamatan Kulawi di Sebelah Selatan. Jumlah penduduk di Kecamatan Gumbasa mencapai 76 jiwa/ km². Adapun distribusi petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Pandere adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Tenaga Kesehatan di Puskesmas Pandere Tahun 2022

Tenaga Kesehatan	Jumlah
Dokter Spesialis	0
Dokter Umum	3
Dokter Gigi	0
Perawat	16
Bidan	19
Kesehatan Masyarakat	3
Kesehatan Lingkungan	2
Gizi	2
Analisis	1
Farmasi	2
Tenaga Manajemen	1

Berdasarkan Tabel 1. Distribusi Tenaga Kesehatan di Puskesmas Pandere Tahun 2022, diketahui bahwa sebagian besar petugas kesehatan yang berada di Puskesmas Pandere adalah Bidan sebanyak 16 orang dan Puskesmas Pandere belum memiliki Dokter Spesialis dan Dokter Gigi. Dalam kaitannya dengan Peran Puskesmas dalam kondisi Pra Bencana dapat dilihat dari 6 hal antara lain keberadaan peta geomedik daerah rawan bencana, jalur evakuasi, inventaris sumber daya sesuai potensi yang mungkin terjadi, penerimaan dan tindak lanjut terkait tindak lanjut informasi peringatan dini, keberadaan tim kesehatan lapangan dalam satgas dan koordinasi lintas sektor. Secara rinci hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Manajemen Pra Bencana di Puskesmas Pandere Tahun 2023

Manajemen Pra Bencana	Status
Keberadaan Peta Geomedik Rawan Bencana	Tidak Ada
Jalur Evakuasi	Ada
Inventaris Sumber Daya sesuai Potensi	Ada
Penerimaan dan Tindak Lanjut Informasi Peringatan Dini	Ada
Keberadaan Tim Kesehatan Lapangan dalam Satgas	Ada

Berdasarkan Tabel 2. Manajemen Pra Bencana di Puskesmas Pandere Tahun 2023 diketahui bahwa kriteria Manajemen Pra Bencana telah ada di Puskesmas Pandere. Akan tetapi Puskesmas Pandere belum memiliki Peta Geomedik Rawan Bencana.

PEMBAHASAN

Peta Geomedik Daerah Rawan Bencana

Adanya pembuatan peta bencana merupakan salah hal penting dalam hal mitigasi bencana (BPBD Bogor, 2020). Pembuatan peta geomedik rawan bencana perlu dilakukan dengan tujuan agar pengurangan risiko bencana yang berpotensi terjadi di suatu wilayah (BNPB, 2023). Petugas surveilans mampu membeirkan pengertian yang jelas dan tepat sehubungan dengan peta kebencanaan. Peta bencana merupakan instrumen substansial dan upaya visualisasi “peluang” dari suatu peristiwa yang berpotensi bencana dalam rangka penyusunan rencana penanggulangan (Rogi, 2017). Berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas surveilans diketahui bahwa belum terdapat peta bencana di Puskesmas Pandere. Peta yang ada adalah peta terdampak dan peta tersebut ditempelkan di Posko Kesehatan dan berisikan informasi terkait klasifikasi penyakit dari korban bencana terutama mereka yang masuk dalam kelompok rentan

sesuai dengan penyakit yang berpotensi KLB. Padahalnya, peta bencana perlu diadakan terutama dalam kegiatan perencanaan dengan tujuan untuk meminimalkan risiko bencana (Kusumastuti, 2014). Peta terdampak tersebut dibuat oleh Tim Gerak Cepat dengan penanggung jawab bencana banjir serta tim kesehatan lain seperti perawat, dokter, tim Promosi Kesehatan, tim Kesehatan Lingkungan juga surveilans.

Jalur Evakuasi

Salah satu bentuk antisipasi terhadap bencana adalah perencanaan proses evakuasi dengan menggunakan jalur evakuasi (Sompie et al., 2022). Jalur evakuasi adalah jalur penyelamatan dengan rancangan khusus dengan tujuan untuk mengarahkan semua area ke lokasi aman yakni titik kumpul bagi semua masyarakat yang beraktivitas ataupun berada di tempat tersebut (Imunitas, 2021). Dalam penelitian ini, diketahui bahwa beberapa tempat telah memiliki jalur evakuasi, jalur evakuasi tersebut dibuat oleh tim TRC Desa yang juga telah terlatih terkait kebencanaan. Jalur evakuasi mampu memperkecil risiko korban dari insiden yang terjadi. Jalur evakuasi sendiri bermanfaat untuk menunjukkan jalan keluar saat kondisi darurat dan untuk menunjukkan rute evakuasi ketika terjadi bencana (Universitas Diponegoro, 2020). Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa jalur evakuasi sangat penting agar tidak ada korban bencana jika terjadi bencana sewaktu-waktu (Wibowo, 2019).

Inventaris Sumber Daya Sesuai Potensi Bahaya yang Mungkin Terjadi

Inventarisasi sumber daya sesuai potensi bahaya sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana di daerah rawan bencana. Kegiatan inventarisasi sumber daya dalam potensi bahaya adalah pengumpulan data terkait sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya mesin yang dimiliki oleh suatu daerah atau instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana (BNPB, 2011). Sumber daya di Puskesmas Pandere telah dipersiapkan dalam hal kebencanaan baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya mesin. Dalam hal sumber daya manusia, setiap TGC telah memiliki perannya masing-masing dalam hal penanggulangan bencana.

Selain itu, setiap orang yang ditugaskan dalam kebencanaan merupakan petugas kesehatan yang telah mengikuti pelatihan kebencanaan terlebih dahulu yang telah dilaksanakan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dan juga Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan pelatihan kebencanaan sendiri dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan petugas kesehatan dan staf sehingga dapat memberikan pertolongan dan upaya tanggap darurat saat kondisi bencana (BPBD Jakarta, 2022).

Petugas kesehatan merupakan bagian penting dalam kesuksesan manajemen bencana. Kelemahan maupun ketiadaan petugas kesehatan menimbulkan kerugian dalam suatu bencana (Kurniyanti, 2012). Pelatihan persiapan kebencanaan pada petugas kesehatan terbukti dapat meningkatkan kemampuan dan kemauan petugas untuk berkerja dalam situasi bencana (Balut et al., 2022). Selain sumber daya manusia sumber daya lain seperti sarana dan prasana juga dibutuhkan dalam keadaan bencana. Sarana dan prasana sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan baik itu kegiatan rutin maupun kegiatan operasional (BPBD Provinsi Kaltim, 2023). Puskesmas Pandere telah memiliki tiga mobil operasional yakni mobil rujukan, mobil keliling dan satu mobil jenazah. Untuk kegiatan kebencanaan, mobil yang digunakan adalah mobil jenazah.

Selain itu, sarana dan prasarana lain yang telah disediakan adalah obat-obatan. Ketersediaan obat-obatan dikatakan cukup baik karena di Wilayah Kerja Puskesmas Pandere terdapat apotik yang dapat memasok obat-obatan jikalau stok obat-obatan puskesmas tidak dapat memenuhi kebutuhan korban bencana. Sarana dan prasarana yang ada di lokasi bencana harus disesuaikan dengan tren penyakit yang muncul pasca bencana. Hal tersebut dapat diupayakan dengan secara

langsung menghitung kebutuhan relatif obat berdasarkan jenis penyakit, usia dan jenis kelamin (Faradilla, 2018).

Menerima dan Menindaklanjuti Informasi Peringatan Dini

Peringatan dini dilakukan dengan tujuan untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk mengurangi risiko bencana, serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007). Puskesmas Pandere telah menerapkan sistem peringatan dini, hal tersebut dilakukan dengan mengamati curah hujan.

Selain itu, petugas kesehatan Puskesmas Pandere, bidan desa dan lintas sektor telah memiliki Group WA untuk komunikasi terkait kebencanaan. Komunikasi terkait bencana banjir diawali dari bidan desa yang terus melaporkan terkait curah hujan. Jika curah hujan berpotensi banjir dan air sungai mulai naik, maka bidan desa juga akan memberitahukan di group yang selanjutnya akan direspon oleh Kepala Puskesmas dan Tim Kebencanaan untuk mempersiapkan diri dalam hal bencana termasuk di dalamnya adalah obat-obatan.

Sistem komunikasi tersebut berjalan dengan baik tanpa ada kendala jaringan. Dari hal tersebut diketahui bahwa tujuan sistem peringatan dini di Puskesmas Pandere sudah dapat dicapai sebagaimana mestinya. Sistem peringatan dini yang dilakukan oleh Puskesmas Pandere juga telah mengikuti langkah peringatan dini sebagaimana mestinya sesuai dengan tahapan, yakni mulai dari pengamatan gejala bencana yang dilakukan oleh bidan desa, kemudian analisis hasil pengamatan gejala bencana oleh bidan desa dan tim kebencanaan di WA Group. Setelah itu dilanjutkan pengambilan keputusan oleh pihak berwenang dalam hal ini adalah Kepala Puskesmas Pandere yang kemudian melakukan penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan mengambil tindak lanjut dengan arahan kepada petugas kebencanaan

Tim Kesehatan Lapangan dalam Satgas

Tim kesehatan lapangan dalam satgas telah dibentuk di Puskesmas Pandere dengan SK Kepala Puskesmas Pandere Nomor 0202/445/047./TU/1/2022 tentang Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Kejadian Luar Biasa di Puskesmas Pandere. Dalam SK tersebut berisikan Uraian Tugas antara lain menyusun rencana kegiatan medis, menghubungi dan menginfentaris rumah sakit di wilayah terdekat yang akan dilibatkan dalam tanggap darurat bencana, menempatkan tim medis di lokasi titik pelayanan yang telah ditentukan, menentukan jumlah RS yang akan dilibatkan pada setiap periode pergantian sesuai dengan jumlah titik lokasi pelayanan yang telah ditentukan dan disepakati ketua posko tanggap darurat bencana, mengatur dan membuat jadwal agenda kegiatan yang akan dilibatkan penanganan tanggap darurat bencana, menyediakan dan membuat daftar obat dan alat-alat kesehatan disertai tim farmasi yang akan melakukan pencacatan distribusi obat yang diperlukan dan mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan tim medis yang terdiri dari RS yang bekerja di lapangan.

Berdasarkan data di SK tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya tim kesehatan lapangan dalam satgas telah dibentuk sesuai dengan tupoksi masing-masing. SK tersebut diberikan kepada TGC yang terdiri dari seorang dokter, perawat, petugas kesehatan lain seperti kesling, kespro bidan dan surveilans. Dengan tugas yang telah diberikan, dokter umum dan bidan tetap dirancang untuk tetap berada di posko kesehatan dan tim kesehatan lainnya bergerak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tim kesehatan lingkungan turun memantau lingkungan yang terdampak bencana, tim surveilans melakukan pemantauan angka kesakitan pada masyarakat terutama kelompok rentan.

Tim promosi kesehatan membantu tim kesehatan lingkungan dan tim surveilans untuk mempromosikan tindakan kesehatan yang tepat saat kondisi bencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, berpodoman pada SK TGC yang telah dibuat dan juga pada materi pelatihan bencana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi. Hal ini selaras dengan Keputusan Menteri

Kesehatan No.066 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa dibutuhkan kesiapsiagaan semua unsur dalam penanggulangan bencana termasuk di dalamnya adalah kesiapsiagaan SDM Kesehatan. Hal ini selaras dengan penelitian dari Februari et al.,(2019) yang menyatakan bahwa pelatihan kebencanaan dapat meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan dalam hal kebencanaan. Selain itu, keterlibatan petugas kesehatan dalam TGC juga meningkatkan pengetahuan petugas dalam hal kebencanaan.

Kegiatan yang dilakukan di Puskesmas Pandere juga telah sesuai dengan rancangan peran tenaga kesehatan dalam fase pra bencana yang ada dalam penelitian Kurniyanti (2012) yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan berperan dalam pra bencana dengan aktif mengikuti pelatihan dan pendidikan terkait kebencanaan dan juga terlibat dalam kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat.

Koordinasi Lintas Sektor

Puskesmas Pandere dalam penelitian ini diketahui telah melaksanakan koordinasi lintas sektor antara lain BNPB dan juga perangkat desa. Koordinasi dilaksanakan secara langsung dan juga melalui Group WA. Dalam koordinasi tersebut, perangkat desa membantu tim kesehatan dalam hal menyampaikan keluhan yang ada di masyarakat, baik itu keluhan terkait air bersih ataupun penyakit yang diderita. Sedangkan dengan BNPB, koordinasi dilakukan secara langsung karena BNPB selalu turun bersama dengan tim kesehatan setiap ada bencana. Setiap sektor melaksanakan perannya masing-masing dengan tujuan untuk meminimalkan dampak dari suatu bencana yang terjadi. Hal tersebut selaras dengan penelitian dari Gooding et al., (2022) yang menyatakan bahwa daerah rawan bencana memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak karena dampak dari sebuah bencana biasanya bersifat multisektoral, dimana bencana tersebut tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan akan tetapi juga aspek sosial ekonomi dari masyarakat. Selain itu, tim kesehatan juga perlu melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan berbagai pihak termasuk di dalamnya dinas kesehatan ataupun lembaga kesehatan lain dalam hal promosi terkait kebencanaan kepada masyarakat awam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat awam dalam menghadapi bencana (Kurniyanti, 2012).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Puskesmas Pandere merupakan Puskesmas yang berada di Wilayah Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi yang terdampak banjir pada Bulan September Tahun 2022. Dalam hal manajemen pra bencana banjir, Puskesmas Pandere telah memiliki jalur evakuasi, inventaris sumber daya sesuai potensi bahaya yang mungkin terjadi, sudah dapat menerima dan menindaklanjuti informasi peringatan dini, tim kesehatan dalam Satgas dan telah melaksanakan koordinasi lintas sektor. Akan tetapi, Puskesmas Pandere belum memiliki Peta Geomedik Daerah Rawan Bencana yang ada hanyalah peta terdampak. Oleh karena itu, Puskesmas Pandere mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dalam manajemen pra bencana banjir mengingat wilayah kerja Puskesmas Pandere yang berpotensi untuk terus terjadi bencana banjir ketika musim hujan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan peta geomedik yang berisikan informasi terkait potensi bencana tidak hanya dalam aspek kesehatan saja tetapi juga dalam hal sosial dan ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM Universitas Tadulako yang telah bersedia untuk mendanai penelitian ini dan terima kasih juga diucapkan kepada tim peneliti serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dan Puskesmas Pandere yang telah bekerja sama dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen Bencana*. Bumi Aksara.
- Anies. (2017). *Negara Sejuta Bencana Identifikasi, Analisis dan Solusi Mengatasi Bencana dengan Manejemen Kebencanaan*. Ar-Ruzz Media.
- Azizah, M., Khoirudin Apriadi, R., Tri Januarti, R., Winugroho, T., Yulianto, S., Kurniawan, W., & Dewa Ketut Kerta Widana, I. (2021). Kajian Risiko Bencana Berdasarkan Jumlah Kejadian dan Dampak Bencana di Indonesia Periode Tahun 2010 – 2020. *PENDIPA Journal of Science Education*, 6(1), 35–40. <https://doi.org/10.33369/pendipa.6.1.35-40>
- Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. (2007). *Pengenalan karakteristik bencana dan upaya mitigasinya di Indonesia*.
- Bagenda, A. F., Utomo, L. P., & Rusydi, M. (2020). Kawasan Bahaya Banjir Di Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 8(3), 260–269.
- Balut, M. D., Der-Martirosian, C., & Dobalian, A. (2022). Disaster Preparedness Training Needs of Healthcare Workers at the US Department of Veterans Affairs. *Southern Medical Journal*, 115(2), 158–163. <https://doi.org/10.14423/SMJ.0000000000001358>
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB (2007).
- Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, 17 (2008).
- BNPB. (2011). *Pedoman Inventarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana*. BNPB.
- BNPB. (2022). *[infografis] : Banjir di Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah*. <https://pusdalops.bnpb.go.id/2022/09/08/infografis-banjir-di-kab-sigi-prov-sulawesi-tengah/>
- BNPB. (2023). *BNPB Susun Peta Risiko Bencana DAS Asahan - Toba*. BNPB. <https://bnpb.go.id/berita/bnpb-susun-peta-risiko-bencana-das-asahan-toba>
- BPBD Bogor. (2020). *Apakah Pemetaan dan Mitigasi Bencana Penting?* BPBD Bogor. <https://bpbd.bogorkab.go.id/apakah-pemetaan-dan-mitigasi-bencana-penting/>
- BPBD Jakarta. (2022). *Sosialisasi dan Simulasi Penanganan Bencana kepada Petugas Kesehatan dan Staf Petugas Puskesmas Pesanggrahan*. BPBD Jakarta. <https://bpbd.jakarta.go.id/berita/70/sosialisasi-dan-simulasi-penanganan-bencana-kepada-petugas-kesehatan>
- BPBD Provinsi Kaltim. (2023). *Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis BPBD Prov. Kaltim 2019-2023*. BPBD Provinsi Kalimantan Timur. https://bpbd.kaltimprov.go.id/uploads/file/1649319676_567453fb5559d8fda78d.pdf
- Degutis, L. (2014). Disaster Epidemiology and Surveillance. *Jekel's Epidemiology, Biostatistics, Preventive Medicine, and Public Health*, 334–338. <https://doi.org/10.1016/b978-1-4557-0658-7.00027-x>
- Faradilla, M. (2018). Peran Tenaga Kefarmasian dalam Penanggulangan Bencana. *Pharmaceutical Sciences and Research*, 5(1), 14–18. <https://doi.org/10.7454/psr.v5i1.3914>
- Februari, N., Di, B., Wilayah, P., & Bencana, R. (2019). Gambaran Kesiapan Tenaga Kesehatan dalam Manajemen Bencana di Puskesmas Rawan Bencana. *INDONESIAN JOURNAL OF COMMUNITY (Jurnal Keperawatan Komunitas)*, 4(1), 11–16. <https://doi.org/10.20473/ijchn.v4i1.12395>
- Findayani, A. (2015). Kesiap Siagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Semarang. *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 12(1), 102–114.
- Fitriyani, J., Khoirudin Apriyadi, R., Winugroho, T., Hartono, D., Dewa Ketut Kerta Widana, I., & Wilopo, W. (2021). Karakteristik Histori Bencana Indonesia Periode 1815 – 2019 Berdasarkan Jumlah Bencana, Kematian, Keterpaparan dan Kerusakan Rumah Akibat Bencana. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(3), 322–327.

- <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.3.322-327>
- Gooding, K., Bertone, M. P., Loffreda, G., & Witter, S. (2022). How can we strengthen partnership and coordination for health system emergency preparedness and response? Findings from a synthesis of experience across countries facing shocks. *BMC Health Services Research*, 1–19. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08859-6>
- Husein, A., & Onasis, A. (2015). Manajemen Bencana. *Syria Studies*, 7(1), 37–72. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Imunitas. (2021). *Jalur Evakuasi*. Imunitas. <https://imunitas.or.id/3616/jalur-evakuasi/>
- Kemkes RI. (2006). *Keputusan Menteri Kesehatan No.066 Tahun 2006* (p. 1).
- Kurniyanti, M. A. (2012). Peran Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Manajemen Bencana (Disaster Management). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 1(1), 85–92. <https://doi.org/10.33475/jikmh.v1i1.87>
- Kusumastuti, L. K. W. (2014). *Geopoint 2014: Seminar Peran Data Geospasial dalam Kebencanaan*. Institut Teknologi Bandung. <https://www.itb.ac.id/berita/geopoint-2014-seminar-peran-data-geospasial-dalam-kebencanaan/4323>
- Martini. (2011). Identification Natural Disaster Sources and Their Solved in Central Sulawesi. *Infrastruktur*, 1, 96–102.
- Mimanggar, S. E. M. (2014). *EVALUASI PERENCANAAN PRABENCANA BANJIR BENGAWAN SOLO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014*. 24, 262–274. <https://doi.org/10.20473/jbe.v4i2.2016.262>
- PKK Kemkes. (2022). *Informasi Awal Banjir di 2 Kecamatan, SIGI, SULAWESI-TENGAH / 06-09-2022*. <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir-di-SIGI-SULAWESI-TENGAH-06-09-2022-83>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 23 (2007).
- Qodriyatun, S. N. (2020). Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 29–42. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1590>
- Qurrotaini, L., & Diana, D. (2021). Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di Sdn Petukangan Selatan 02 Jakarta Selatan. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(2), 70. <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i2.5000>
- Rogi, O. H. A. (2017). Peta Kebencanaan : Urgensi Dan Manfaatnya. *Media Matrasain*, 14(3), 61–76.
- Sompie, T. P. F., Ratnasari, T., Sutrisno, A. L. P., Watti, R. H. P., Makangiras, R. E., & Mokolintad, R. (2022). Rancangan Jalur Evakuasi Kebencanaan Di Sekolah Dasar Kristen Victory Kota Manado. *Prosiding Seminar Nasional Produk Terapan Unggulan Vokasi*, 1(1), 1–11.
- Universitas Diponegoro. (2020). *Tahapan Penting Kesiapsiagaan Bencana, Jalur Evakuasi di KJB Sudah Memadai*. Universitas Diponegoro. <http://kkn.undip.ac.id/?p=181006>
- Wibowo, A. (2019). *Pentingnya Jalur Evakuasi di Lokasi Wisata*. BNPB. <https://bnpb.go.id/berita/pentingnya-jalur-evakuasi-di-lokasi-wisata>